

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Indonesia, 2002). Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai apabila masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di Indonesia menurut BPS per Maret 2023 mencapai 9,36% atau sekitar 25,9 juta orang. Atqo Mardiyanto selaku sekretariat utama BPS mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin ini mengalami penurunan sekitar 460.000 jiwa dari pada jumlah penduduk miskin per September 2022. Beliau juga memaparkan bahwa meskipun angka kemiskinan terus menurun, namun angka kemiskinan ini belum pulih seperti masa sebelum pandemi. Dalam rangka mengatasi kemiskinan yang meningkat setelah masa pandemi berakhir, pemerintah diharapkan mampu mengambil kebijakan yang tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut akan membantu mengatasi ketimpangan sosial, menurunkan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih luas (Badan Pusat Statistik, 2023).

Akan tetapi untuk mengatasi ketimpangan sosial, mengurangi angka kemiskinan dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah tidak dapat mengatasinya dalam waktu singkat. Pemerintah memerlukan kerangka kerja atau pendekatan holistik dari beberapa sektor, termasuk salah satunya adalah sektor perekonomian di daerah. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu menurunkan tingkat

kemiskinan, meratakan kesenjangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat (Rachmad et al., 2023).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi merujuk pada perubahan kondisi ekonomi yang terjadi secara berkelanjutan di daerah tertentu untuk mencapai keadaan yang dianggap lebih baik dalam jangka waktu tertentu (Marpaung et al., 2023). Sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah memperoleh kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa diperkirakan menggunakan tingkat PDB atau Pendapatan Domestik Bruto.

Menurut laporan Bank Dunia, PDB Indonesia mencapai angka 1,12 Triliun USD atau naik sekitar 5,2 persen dari tahun sebelumnya dan menempati peringkat ke-16 di dunia pada tahun 2019. Namun, karena menyebar luasnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi -2,1 persen. Meskipun demikian, Indonesia bisa bangkit di tahun 2021 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 6,1 % sesuai dengan laporan *International Monetary Fund* (IMF) (Batubara, 2023).

Hal ini sesuai dengan naik turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia yang mengalami kenaikan ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada masa Pandemi COVID-19. Lalu mengalami penurunan saat pertumbuhan ekonomi justru mengalami kenaikan setelah masa Pandemi COVID-19 berakhir. Dengan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat mempengaruhi naik turunnya angka kemiskinan di suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, dan oleh karena itu dapat mengurangi kemiskinan. Semakin tinggi pertumbuhan Ekonomi, semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran (Ananda et al., 2023).

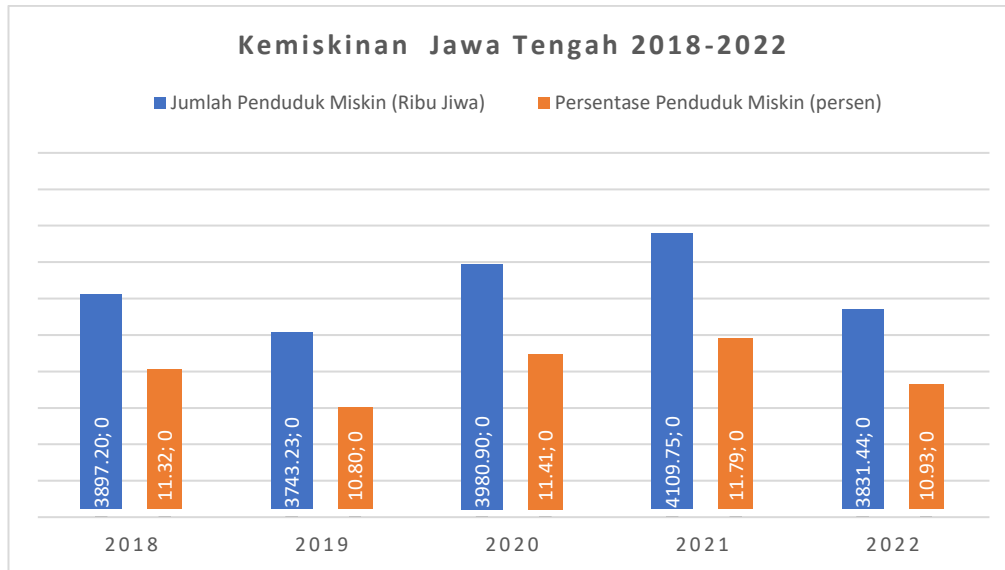
Namun, terdapat situasi dimana pertumbuhan ekonomi tidak menjadi kadar yang signifikan untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Misalnya, saat pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah atau tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Atau berarti ada beberapa

wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan wilayah lain. Ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti infrastruktur yang kurang berkembang dan ketergantungan wilayah pada pendapatan tertentu (Fadilah & Perwithosuci, 2023). Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam pengembangan infrastruktur dan ketergantungan wilayah terhadap sumber pendapatan tertentu bisa digunakan analisis rasio keuangan.

Pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan kemandirian keuangan daerah sangat penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama-tama, pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dapat meningkatkan pendapatan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut melalui peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan kemandirian keuangan daerah dapat memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lewat penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh daerah tersebut yang kemudian berdampak pada angka kemiskinan.

Mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya serta atas dasar pertimbangan-pertimbangan penulis lainnya, penelitian ini akan lebih berfokus pada satu daerah yang menjadi salah satu wilayah menonjol dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena terletak geografis di tengah Pulau Jawa dan dikelilingi oleh provinsi-provinsi penting di Indonesia seperti Jakarta, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah merupakan daerah yang sangat relevan untuk penelitian pertumbuhan ekonomi karena wilayah ini memiliki perkembangan ekonomi yang beragam dan merupakan salah satu wilayah termiskin kedua di Pulau Jawa dan Bali setelah DIY Yogyakarta (Viryanto, 2023).

Berikut tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada 2018-2022:



**Gambar 1. 1.** Diagram Batang Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah  
*Sumber:* Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2018 sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia, tingkat kemiskinan provinsi Jawa Tengah hanya berkisar di angka 3897,20 ribu jiwa. Kemudian menurun di tahun 2019 dimana saat itu pandemi Covid-19 baru saja muncul dan belum begitu berpengaruh pada kegiatan ekonomi terutama di wilayah-wilayah pelosok seperti pedesaan. Namun pada tahun berikutnya, setelah diberlakukan *lockdown* di berbagai daerah dan menghambat terjadinya kegiatan ekonomi, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah meningkat drastis bahkan melebihi angka kemiskinan pada tahun 2018.

Berpuncak pada tahun 2021, dimana Covid-19 belum juga berakhir dan peraturan *lockdown* yang berpengaruh buruk terhadap kegiatan ekonomi tetap berlangsung selama dua tahun, angka kemiskinan mencapai angka tertinggi sebesar 4109,75 ribu jiwa. Lalu pada tahun 2022, angka kemiskinan mengalami penurunan sejumlah 102,57 ribu jiwa per Maret 2022 (BPS Jateng, 2023). Meski menurun, jika dibandingkan dengan kemiskinan pada tahun 2019, angka kemiskinan belum sepenuhnya pulih seperti masa awal saat pandemi COVID-19 baru saja mewabah yang hanya berkisar di angka 3743,23 ribu jiwa.

Saat kegiatan Laboratorium Kebijakan Analisis Dampak Program Penanggulangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimana program tersebut adalah suatu program yang dijalankan pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan, Sumarno yang merupakan Sekretaris Daerah Jawa Tengah mengatakan bahwa keberhasilan menurunnya tingkat kemiskinan di Jateng merupakan buah dari upaya pemerintah. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana pendapatan asli daerah se-efektif mungkin melalui kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah (Pemprov Jateng, 2023). Selain program RTLH, pemerintah Jawa Tengah juga mengalokasikan pendapatan daerah untuk program pengentasan kemiskinan lain seperti pelatihan kerja dan bantuan modal kerja yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat miskin agar tidak berketergantungan kepada bantuan dari pemerintah.

Selain dari program-program dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut, Pemprov Jateng juga mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan Daerah. Pemerintah tidak hanya mengandalkan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, maupun pemerintah pusat, tetapi juga menggali potensi-potensi yang ada dari kalangan industri melalui dana CSR, Baznas dan lain-lain. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha mewujudkan daerah yang otonom dan tidak bertopang pada pendanaan pemerintah pusat untuk mencapai harapan dalam penanggulangan kemiskinan.

Meski upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Jawa Tengah dapat mencapai hampir setengah dari tujuannya dalam menurunkan angka kemiskinan, akan tetapi data terbaru BPS per Maret 2023 menyebutkan bahwa angka kemiskinan Jawa Tengah masih berada jauh lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan nasional yang tercatat 9,36%. Dari 38 provinsi yang ada di seeluruh Indonesia, Jawa Tengah menempati tempat ke 15 terkait rasio kemiskinan tertinggi di Indonesia. Rasio Kemiskinan Jawa Tengah juga jauh diatas Provinsi Jawa Bali yang hanya 7,80%. Dari tujuh Provinsi di Jawa Bali, hanya Provinsi DIY yang memiliki rasio kemiskinan lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah (BPS Jateng, 2023). Kondisi kemiskinan

tersebut masih harus menjadi perhatian serius dan membutuhkan upaya lebih besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Melalui evaluasi rasio efektivitas PAD dan rasio kemandirian, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam keuangan mereka dan merumuskan rekomendasi yang lebih andal dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif juga konsisten. Mengelola keuangan dengan baik akan dapat melahirkan banyak peluang dalam pembangunan dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta membantu mengatasi masalah kemiskinan dengan membuka lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan daya beli masyarakat daerah (Setyaningrum & Erdkhadifa, 2023).

Dengan demikian, evaluasi dua rasio keuangan pemerintah daerah dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pada tingkat kemiskinan. Evaluasi rasio keuangan pemerintah daerah penting untuk membantu pemerintah daerah dalam membuat keputusan yang tepat, dan membuka peluang bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

Itulah mengapa, peneliti terdorong melaksanakan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Publik terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Intervening: Periode 2018-2022”** yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari rasio keuangan pemerintah daerah antara lain rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio kemandirian terhadap naik turunnya tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemediasi (perantara) atau variabel intervening. Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Setelah pemaparan latar belakang yang disampaikan tersebut, peneliti berhasil mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi subjek penelitian sebagai berikut:

- a. Angka kemiskinan yang terus menurun, namun angka kemiskinan ini belum sepuluh seperti saat sebelum pandemi Covid-19.
- b. Tingkat kemiskinan di Indonesia yang terus bertambah naik ketika pertumbuhan ekonomi berkurang pada masa pandemi Covid-19. Lalu mengalami penurunan saat pertumbuhan ekonomi justru mengalami kenaikan setelah masa pandemi Covid-19 berakhir.
- c. Pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah atau tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Atau berarti ada beberapa wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan wilayah lain.
- d. Dari 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia, Jawa Tengah menempati tempat ke 15 terkait rasio kemiskinan tertinggi di Indonesia. Dari 7 daerah yang ada di Jawa Bali, hanya Provinsi DIY yang memiliki rasio kemiskinan lebih rendah dari pada Jawa Tengah.
- e. Banyaknya daerah yang belum mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya, atau masih bertopang pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

### **2. Batasan Masalah**

Dikarenakan adanya beberapa masalah yang muncul, maka dibutuhkan pembatasan masalah agar dapat menghindarkan kesalahan pandangan terkait penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada suatu batasan tertentu, yaitu “Analisis Pengaruh Rasio keuangan Publik diantaranya menganalisis Pengaruh Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 – 2022.”

### 3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang selesai dipaparkan di atas, berikut adalah pertanyaan penelitian yang peneliti usulkan:

- a. Apakah Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah?
- b. Apakah Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah?
- c. Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.?
- d. Apakah rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah?
- e. Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening*?
- f. Apakah rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening*?
- g. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan-tujuan yang ingin didapat atas dilakukannya penelitian ini:

- a. Menganalisis pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menganalisis pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Menganalisis pengaruh rasio Efektivitas PAD terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.
- d. Menganalisis pengaruh rasio kemandirian terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.



- e. Menganalisis pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening*.
- f. Menganalisis pengaruh rasio kemandirian terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening*.
- g. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Publik pada Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Intervening, Periode 2018-2022 ini diharapkan memiliki nilai berupa beberapa manfaat, diantaranya:

### a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau manfaat keilmuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan terkait kinerja keuangan daerah khususnya rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio kemandirian tepatnya di Provinsi Jawa Tengah.

### b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ialah kegunaan yang dapat diterima secara langsung oleh pihak-pihak berkepentingan dan terkait dalam penelitian. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah peneliti, masyarakat provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### 1) Bagi peneliti

Manfaat yang didapat dari dilakukannya penelitian ini adalah peneliti dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya selama perkuliahan, baik mengenai pengetahuan Akuntansi Syariah maupun pengetahuan di bidang ekonometrika, mengingat penelitian ini menggunakan analisis ilmu ekonometrika. Selain itu penelitian juga menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pengukuran kinerja

keuangan daerah berupa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan Rasio kemandirian.

2) Bagi Jurusan

Manfaat yang didapat oleh jurusan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk rujukan, acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak atau peneliti berikutnya yang melakukan penelitian dengan tema, wilayah kajian atau objek yang sama dengan penelitian ini.

3) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan serta dapat pula digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisa masalah-masalah khususnya masalah yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan pemerintah provinsi Jawa Tengah.

**D. Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitin, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini mengemukakan tentang variabel penelitian, sintesis teori dan hipotesis teoritik.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini mencakup obyek penelitian, penentuan populasi dan sampel, definisi operasional variabel, data penelitian, model penelitian, teknik analisis data dan pengujian hipotesis statistik.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini meliputi deskripsi data, persyaratan uji hipotesis, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini peneliti menyimpulkan seluruh pembahasan yang telah diteliti dalam poin kesimpulan.

